

Analisis Catatan atas Laporan Keuangan pos aset tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado

Timotius Siagian

Corresponding e-mail: timothyusiagian11@gmail.com

Sam Ratulangi University - Indonesia

Novi Swandari Budiarmo

Sam Ratulangi University - Indonesia

Peter M. Kapojos

Sam Ratulangi University - Indonesia

Abstract

Presenters of financial reports must include notes as an integral part of general-purpose financial reports. This study discuss Government Regulation (PSAP) Number 71 Year 2010, Statement number 04 about Notes to the Financial Statements, focusing on the fixed assets account. The objectives of this research are to ascertain the level of detail and clarity of the notes on financial reports for fixed assets items presented by the Finance and Asset Management Agency Regions (BKAD) of the Manado City Government for users of financial reports, including the government and the public. The research method is descriptive qualitative, with data collection through interview techniques and documentation. The research results show that the Notes to Financial Reports, especially fixed asset items produced by the BKAD of the Manado City Government, are not fully informative.

Keywords: financial reports; government accounting standard; notes to financial reports

Received

2 November 2024

Revised

11 February 2025

Accepted

19 February 2025

Published

20 February 2025

DOI: 10.58784/ramp.237

Copyright © 2025 Timotius Siagian, Novi Swandari Budiarmo, Peter M. Kapojos



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Tuntutan masyarakat terhadap laporan keuangan yang transparan dan akuntabel mendorong reformasi akuntansi serta administrasi sektor publik. serta semakin mendorong meningkatnya peran akuntansi pemerintah (Murapi, 2016; Ardhiarisca dan Ananda, 2023:45). Akuntabilitas dalam laporan keuangan mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam mencapai tujuan tertentu (Herindraningrum dan Yuhertiana, 2021; Qomah dan Ismunawan, 2021; Sulastri et al., 2022). Pertanggungjawaban laporan keuangan harus disusun secara sistematis dan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang diterima secara umum (Jusmani et al., 2022:199-212). Namun pada umumnya pemanfaatan laporan keuangan pemerintah hanya sebatas pemenuhan fungsi pertanggungjawaban (Rahmayani dan Sudarno, (2014), hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan laporan keuangan belum memenuhi aspek kebermanfaatan karena rendahnya kualitas informasi yang tersedia pada laporan keuangan (Satar dan Rachman, 2020). Kualitas laporan keuangan menjadi isu penting karena dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan (Purwasih, 2023)

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah dapat diwujudkan dalam pengungkapan laporan keuangan (Khasanah dan Rahardjo, 2014). Hal ini didukung dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 04 bahwa tujuan umum adalah untuk memenuhi kebutuhan pengguna informasi akuntansi keuangan yang lazim, selain itu maksud laporan ini adalah agar pembaca secara luas dapat memahami isi laporan keuangan, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman diantara pembacanya. CaLK memuat penjelasan atau daftar terinti atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan keuangan, karena itu CaLK sebaiknya informatif.

Badan keuangan dan Aset daerah Pemerintah Kota Manado menerapkan PSAP No 04 Catatan atas Laporan Keuangan yang dibuat oleh bidang Akuntansi. Secara keseluruhan CaLK yang dibuat oleh Badan keuangan dan Aset Daerah kota Manado sudah mengikuti standar yang ditetapkan, yaitu menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Namun, Catatan atas Laporan Keuangan khusus pada pos aset tetap yang dihasilkan belum tentu informatif bagi pengguna laporan keuangan.

Beberapa hasil penelitian mengambil lingkup penelitian pemanfaatan CaLK (Ningsih dan Welly, 2014; Rahmayani dan Sudarno, 2014; Satar dan Rachman, 2020) dan pengungkapan dalam CaLK (Veranti dan Ritonga, 2018; Handayani, 2019), karena masih kurangnya penelitian terkait CaLK maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebermanfaatan CaLK berdasarkan aspek informatif bagi pengguna laporan keuangan

Kajian literatur

Akuntansi pemerintahan

Akuntansi pemerintah adalah proses mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan transaksi keuangan dalam sektor pemerintahan, tujuannya untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan akurat dalam pengelolaan dana publik. Entitas pemerintahan mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga yang dibiayai oleh dana publik. Prinsip-prinsip akuntansi yaitu, prinsip akurasi, prinsip transparansi, dan prinsip konsistensi juga prinsip akuntabilitas. Pemerintah dalam konteks akuntansi memiliki karakteristik menurut (Effendi, 2021) yaitu pemerintah tidak berusaha menghasilkan keuntungan, sebagian besar pendapatan diperoleh dari pendapatan yang dianggap "memaksa", yaitu pajak atau pendapatan lainnya yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai pendapatan yang pemerintah berhak untuk memungutnya. Akuntansi pemerintah adalah salah satu akuntansi sektor publik yang berkembang pesat di Indonesia adalah akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah bagian dari disiplin ilmu akuntansi Indonesia yang terus berkembang untuk penyempurnaan sebagai referensi. Akuntansi pemerintah di Indonesia mengalami perkembangan sejak tahun 2005 (Fitri et al., 2023:12), melalui Peraturan Pemerintah Tahun 2005 No 24 mengenai SAP.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016

Pemendagri No. 19 Tahun 2016 mengenai Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal ke-3 menyatakan bahwa barang milik daerah yang dibeli ataupun diperoleh atas beban APBD atau barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah termasuk kedalam barang milik daerah. Oleh sebab itu pada pasal 4 tertulis barang milik daerah dilarang dan tidak diperbolehkan

untuk digadaikan atau dijadikan jaminan untuk memperoleh pinjaman ataupun diserahkan kepada pihak lainnya sebagai bentuk pembayaran atas tagihan kepada pemerintah daerah. Barang yang merupakan milik daerah tidak dapat disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 SAP berbasis akrual ialah SAP yang mengakui pendapatan, beban aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, dan juga dapat mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran seperti yang sudah ditetapkan dalam APBD.

PSAP No. 04 Tentang Catatan Atas Laporan Keuangan

PP No. 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa CaLK merupakan komponen yang tidak dapat terpisahkan dari keseluruhan laporan keuangan pemerintah. CaLK dibuat agar seluruh laporan keuangan pemerintah dapat dengan mudah dimengerti oleh pengguna laporan keuangan khususnya masyarakat umum. Menurut PSAP No. 04, CaLK terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Neraca ialah laporan yang menyajikan sumber ekonomis dari suatu instansi atau perusahaan.

Indikator Penyajian Informasi Dalam CaLK

PSAP No. 04 dalam paragraph ke 45 bahwa hal yang bisa membantu para pengguna dalam memahami informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yaitu pengungkapan entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang membentuk laporan keuangan dengan tujuan umum. Pengguna akan memiliki kerangka untuk menganalisis informasi data yang tersedia. Pengguna bisa saja salah dalam memahami masalah yang ada karena tidak adanya informasi mengenai entitas pelaporan dan komponennya.

Pada bagian struktur dan isi dalam PSAP No. 04 Paragraf ke 16 menyatakan bahwa Pengungkapan pada CaLK bisa disajikan dalam rupa narasi, bagan, serta bentuk lainnya yang umum untuk menggambarkan posisi keuangan selama

periode tertentu, sehingga memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan. Maka didalam penelitian ini terkhususnya pos aset tetap akan menggunakan indikator narasi, bagan, serta skedul sebagai tolak ukur CaLK yang terperinci, naratif, bisa dimengerti oleh masyarakat (informatif). Narasi yang dihasilkan harus berisi penjelasan atau analisis mengenai nilai suatu pos aset tetap yang disajikan didalam neraca, serta bagan dan skedul untuk mengukur tolak ukur ke informatifan CaLK. Dalam CaLK ialah penyajian informasi yang diwajibkan serta disarankan oleh PSAP dan pengungkapan informasi yang diperlukan sebagai kewajiban. Hal ini tertuang dalam struktur dan isi CaLK pada paragraf ke 13.

Pos Aset Tetap

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua aset berwujud memiliki lama manfaat lebih dari dua belas bulan serta di anjurkan dipergunakan untuk kegiatan pemerintah daerah ataupun dimanfaatkan oleh masyarakat umum disebut aset tetap. Aset tetap dikategorikan berdasar dengan kesamaan karakteristik atau fungsinya didalam operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut: tanah, peralatan serta mesin, Gedung serta bangunan, jalan, irigasi serta jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan, serta akumulasi penyusutan aset tetap.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari BKAD Kota Manado. Penelitian kualitatif memanfaatkan metode kualitatif yaitu analisis, pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen yang berkaitan dengan nilai informasi laporan keuangan. Wawancara mendalam ialah cara untuk mendapatkan informasi data secara menyeluruh dengan berbicara langsung dengan subjek (Ardianto, 2011:5). Selanjutnya dilakukan analisis dan dijelaskan berdasar dengan fenomena-fenomena penelitian yang dihasilkan.

Data diperoleh dengan cara wawancara dari informan dan dokumentasi, sedangkan sumber data penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data primer seperti hasil wawancara dengan BKAD Kota Manado berdasarkan daftar

pertanyaan namun dikhususkan untuk Bidang Akuntansi sebagai pembuat CaLK dan untuk Bidang Aset yang menangani CaLK terkait pos Aktiva tetap. Data sekunder berupa dokumen CaLK PSAP No.04 Neraca terkhususnya pos aset tetap, serta berkas regulasi perundang-undangan berhubungan dengan Standar Akuntansi yang ditetapkan oleh Pemerintah dan PSAP No.04 CaLK khususnya pos aktivas tetap.

Hasil dan pembahasan

Hasil

Berdasarkan dengan wawancara yang penulis lakukan di pegawai BKAD Manado selaku informan bahwa penyajian CaLK disajikan secara jelas dan terperinci. Disaat terjadinya reklasifikasi dari aktiva tetap ke aktiva lainnya, atau dari barang dan jasa ke belanja modal begitupun sebaliknya, akan langsung di catat, serta dirincikan apa saja yang termasuk didalam tanah, peralatan, mesin, serta lainnya yang termasuk dalam aktiva tetap, dan aset-aset lainnya kedalam tabel neraca, disaat terjadinya reklasifikasi, mutasi bertambah, dan mutasi berkurang. Setelah dibuat secara jelas serta terperinci, narasi juga akan dibuat agar supaya CaLK yang dihasilkan menjadi lebih jelas bagi para pengguna. Informan kedua dari bidang aset menjelaskan bahwa dalam aktiva tetap terdapat 6 golongan barang yaitu tanah, peralatan serta mesin, gedung serta bangunan, kemudian jalan,irigasi serta jaringan, aktiva tetap lainnya, dan juga konstruksi dalam pengerjaan. Masing-masing dalam kategori barang tersebut disajikan dalam CaLK mulai dari saldo awal, penambahan serta pengurangan yang terjadi selama periode berjalan, sampai dengan menghasilkan saldo akhir, serta ditambahkan dengan penjelasan-penjelasan yang diminta pemerika atau BPK.Informan ketiga yang yang diwawancarai adalah pegawai bidang akuntansi menjelaskan bahwa perubahan metode pencatatan dari basis kas ke basis akrual berdampak terhadap penyajian CaLK.

Pembahasan

Saldo aset tetap per tanggal 31 Desember 2023 bernilai Rp4.680.121.655.522,79 dibandingkan dengan saldo aset tetap periode sebelumnya tahun 2022 bernilai Rp.4.379.549.279.550,32 berarti telah mengalami

kenaikan senilai Rp.300.572.375.972,47 atau jika dibuatkan dalam persen 6,86%. Dibuatkan rincian aset tetap pada tahun 2023 yang dibandingkan dengan tahun 2022 terdapat 7 aset tetap yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan serta akumulasi penyusutan.

a. Tanah

Catatan atas Laporan Keuangan pos aset tetap tanah telah dirincikan nilai tanah tahun 2023 dengan uraian 5 penambahan nilai tanah dan 3 pengurangan nilai tanah. Pada aset tanah ini terdapat indikator narasi berupa penjelasan, skedul seperti dokumen-dokumen atau surat pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan dan bagan atau perpindahan akun. Pada belanja modal tanah yang diberikan terhadap dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dan pada dinas perindustrian dan perdagangan tidak dinarasikan secara jelas, hanya memberikan pernyataan terkait belanja modal yang diberikan, sedangkan indikator skedul dicantumkan berupa Berita Serah Terima atau yang disebut dengan BAST terdapat pada setiap hibah tanah yang terjadi. Sedangkan untuk indikator bagan setiap kali terjadi reklasifikasi maka termasuk kedalam indikator bagan karena bagan merupakan perpindahan akun, contohnya reklasifikasi dari aset lain-lain ke aset tanah karena tanah yang sebelumnya dicatat sebagai aset lain-lain, hal ini berdasarkan PKS pekerjaan reklamasi Teluk Manado oleh PT. Papetra Perkasa Utama.

b. Peralatan dan Mesin

Terjadi 8 penambahan nilai peralatan dan mesin di tahun 2023 dan 11 pengurangan. Total jumlah penambahan bernilai Rp59.626.665.342,00 dan pengurangan bernilai Rp26.479.868.278,50. Untuk indikator narasi terdapat di beberapa bagian pada aset ini namun tidak semua bagian memberikan narasi yang jelas dan baik terkait pembahasan masing-masing, contohnya pada bagian belanja modal untuk peralatan mesin hanya disajikan dalam bentuk daftar tabel yang memberiskan nama perangkat daerah dan jumlah begitupun untuk beberapa reklasifikasi yang terjadi tidak dijelaskan melalui narasi. Indikator kedua yaitu skedul, dalam aset ini berupa Berita Acara Penerimaan Barang/Bantuan, setiap barang atau bantuan yang dihibahkan

mencantumkan skedul yang sesuai dengan bagian yang terkait. Untuk indikator yang ketiga yaitu bagan, beberapa reklasifikasi yang tercatat mencantumkan perpindahan akun yang terjadi entah untuk penambahan nilai ataupun pengurangan nilai. Sebagai contoh, reklasifikasi ke belanja pemeliharaan, yaitu perpindahan akun yang awalnya tercatat dalam akun peralatan mesin terjadi perpindahan akun ke aset belanja pemeliharaan, pada reklasifikasi ini narasi yang disajikan tidak dijelaskan dengan lebih jelas sehingga bagi pembaca kurang dalam memahaminya.

c. Gedung dan Bangunan

Terdapat 8 penambahan nilai gedung dan bangunan serta 6 pengurangan. Jumlah penambahan yaitu Rp264.154.963.949,29 dan untuk pengurangan berjumlah Rp117.013.048.503,58. Sama seperti aset sebelumnya pada aset gedung dan bangunan ini juga indikator narasi pada bagian belanja modal tidak dinarasikan secara jelas, hanya menyajikan daftar belanja berupa tabel yang berisikan nama perangkat daerah dan jumlah belanja modal, sedangkan untuk bagian hibah dinarasikan secara baik dan jelas setiap kejadian yang terjadi. Indikator kedua yaitu skedul, aset ini mencantumkan skedul berupa Berita Acara Serah Terima contohnya yang diberikan oleh Kementerian PUPR berdasarkan BATS No.1131.1/BA/DC/2023 tanggal 29 November 2023. Indikator ketiga yaitu bagan, yang menuliskan setiap perpindahan akun yang terjadi atau reklasifikasi. Contohnya pengurangan yang terjadi dikarenakan reklasifikasi ke aset lain-lain yang awalnya berasal dari aset gedung dan bangunan yang dirincikan melalui narasi secara jelas letak dari setiap gedung dan bangunan.

d. Aset Tetap Lainnya

Indikator penyajian catatan atas laporan keuangan yang disajikan oleh BKAD untuk indikator narasi, pada bagian belanja modal aset tetap lainnya tidak dinarasikan secara jelas hanya memberikan pernyataan sedangkan untuk bagian lainnya juga terjadi hal yang sama tidak adanya indikator narasi. Kemudian indikator yang kedua yaitu skedul dalam aset ini tidak dicantumkan skedul atau dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan untuk indikator bagan, reklasifikasi banyak terjadi di aset ini contohnya pengurangan yang terjadi dari aset tetap lainnya ke aset tak

berwujud, inipun tidak dinarasikan secara jelas. Sehingga dapat dilihat bahwa pada aset tetap lainnya ini tidak disajikan secara rinci dikarenakan tidak adanya kedua indikator yaitu narasi dan skedul.

e. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Dalam CaLK yang BKAD hasilkan ketiga indikator yang ingin dilihat adalah yang pertama narasi, pada aset ini narasi berupa penjelasan terkait bagian didalamnya sangat minim karena penyajiannya hanya memberikan pernyataan saja dan menyebutkan nilai tidak memberikan penjelasan berupa narasi. Kedua skedul, disini juga tidak diberikan skedul atau dokumen serta surat atau berita acara yang dipertanggungjawabkan. Namun pada indikator ketiga yaitu bagan, pada aset ini meliputi refkasifikasi dimana pada saat terjadi pengurangan yang disebabkan oleh perpindahan akun atau reklasifikasi dari aset konstruksi dalam pengerjaan ke aset gedung dan bangunan.

f. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi sampai pada tahun 2023 adalah Rp1.721.178.334.493 dibandingkan dengan periode sebelumnya tahun 2022 Rp1.516.350.856.785,58 terjadi kenaikan sebesar Rp204.827.477.707,90 atau naik sebanyak 13,51%. Dalam penyajiannya dilihat dari ketiga indikator yaitu narasi, dalam aset ini dinarasikan dengan cukup baik karena memberikan penjelasan setiap akumulasi dari aset tetap lainnya, namun indikator skedul tidak dicantumkan seperti berita acara yang ada, untuk indikator bagan ditulis dalam bentuk refklasifikasi atau perpindahan akun.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di BKAD Manado mengenai analisis Catatan atas Laporan Keuangan pos Aset Tetap, untuk menilai atau mengevaluasi apakah CaLK yang dihasilkan sudah informatif atau belum informatif. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa CaLK yang disajikan BKAD sudah baik, dan mengikuti sesuai dengan standar yang berlaku yaitu berlandaskan pada PP No. 71 Tahun 2010 serta Permendagri No. 16 Tahun 2019, juga mengikuti Peraturan daerah yang ada. CaLK dalam BKAD Manado sudah cukup menjelaskan apa saja yang dirincikan dalam aset tetap yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, juga jalan irigasi dan jaringan, aset

tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan. BKAD selalu melampirkan perbandingan nilai dari periode sebelumnya dengan periode berjalan sehingga setiap ada kenaikan ataupun penurunan maka perbedaannya akan terlihat jelas.

Jika dilakukan analisis lebih mendalam, masih ditemukan banyak kelemahan dalam CaLK yang disajikan oleh BKAD Manado. Contohnya, narasi yang disajikan dapat dikatakan jelas hanya pada beberapa bagian saja. Sebagai contoh, dalam peralatan dan mesin, terdapat mutasi ke Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp252.500.000,00 serta mencantumkan BAST, namun tidak dijelaskan secara rinci mengenai bentuknya. Sementara itu, narasi dalam mutasi ke Kecamatan Singkil senilai Rp107.286.500,00 mencakup dua unit motor sampah roda tiga senilai Rp48.193.250,00 per unit dengan BAST yang dicantumkan. Dari hal tersebut, terlihat adanya perbedaan dalam tingkat kejelasan narasi yang disajikan oleh BKAD Manado, yang dapat menyebabkan kesalahpahaman bagi pengguna laporan keuangan, terutama masyarakat umum, dalam memahami isi CaLK.

CaLK yang disajikan oleh BKAD Manado sudah sangat jelas. Contohnya, setiap kali terjadi reklasifikasi atau perpindahan akun, BKAD Manado selalu memberikan penjelasan mengenai alasan perubahan tersebut. Namun, kenyataannya, tidak semua reklasifikasi dilengkapi dengan narasi atau penjelasan yang menyeluruh, dan penyajiannya hanya mencakup bagian tertentu saja. Terkait skedul, BKAD Manado selalu menjalankannya sesuai dengan regulasi yang berlaku, yaitu Permendagri No. 16/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal 5, yang mengharuskan ketersediaan dokumen pendukung. Hal ini telah dilakukan oleh BKAD Manado dengan melampirkan dokumen seperti BAST (Berita Acara Serah Terima). Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa CaLK yang disajikan oleh BKAD Manado belum sepenuhnya informatif.

Daftar pustaka

- Ardhiarisca, O., & Ananda, A. D. (2023). Analisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah PSAP No. 01 pada Pemerintah Daerah Kab. Lamongan. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 8(1), 44–55. <https://doi.org/10.52062/keuda.v8i1.2744>.
- Ardianto, E. (2011). *Metodologi penelitian untuk public relations kuantitatif dan kualitatif*. Simbiosis Rekatama Media.

- Effendi, S. (2021). *Akuntansi pemerintahan berbasis akrual*. CV Batam Publisher.
- Fitra, H. (2019). *Analisis neraca dan laporan realisasi anggaran pemerintah daerah*. CV IRDH.
- Fitri, P., Putri, A., & Yulia, R. (2023). *Akuntansi pemerintahan*. Sada Kurnia Pustaka.
- Handayani, S. (2019). Pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2006. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 7(2), 143–154. <https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/326>.
- Herindraningrum, F. F., & Yuhertiana, I. (2021). Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia: Literature review. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 12(2), 157–171. <https://doi.org/10.18860/em.v12i2.12287>.
- Jusmani, H., Hendri, E., & Kurniawan, T. (2022). Analisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan di pemerintah daerah Ogan Komering Ilir. *Jurnal Media Akuntansi*, 4(2), 199–212. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/mediasi/article/download/7862/5706>.
- Khasanah, N. L., & Rahardjo, S. N. (2014). Pengaruh karakteristik, kompleksitas, dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(3), 1–11. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/6153>.
- Murapi, I. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (Studi empiris pada SKPD di Kabupaten Lombok Tengah). *Jurnal InFestasi*, 12(2), 131–143. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v12i2.2764>.
- Ningsih, N. H., & Welly. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) oleh pengguna laporan keuangan daerah di OPD Kota Palembang. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 2(2), 255–266. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/balance/article/view/1178>.
- Pemerintah Indonesia. (2010). PSAP No. 04 Catatan atas Laporan Keuangan.
- Purwasih, R. (2023). Perkembangan terkini riset kualitas laporan keuangan. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 5(1), 34–38. <https://doi.org/10.37034/infec.v5i1.186>.

- Rahmayani, T., & Sudarno, S. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) oleh pengguna laporan keuangan pemerintah (Studi empiris pada instansi pemerintah di Jawa Tengah). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1113–1121. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/6175>.
- Reza, H., & Susanti, M. (2022). *Akuntansi pemerintahan*. Edisi ke-1. CV Media Sains Indonesia.
- Satar, M., & Rachman, Y. A. (2020). Pengaruh pemanfaatan catatan atas laporan keuangan (CaLK) dan penggunaan laporan keuangan daerah terhadap capaian kinerja instansi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. *AKURAT: Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 11(3), 80–92. <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat/article/view/338>.
- Sulastri, D., Abdullah, A. A., Fathir, K., & Casilam. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah: Studi kasus pada BKD Kota Depok. *Jurnal Neraca Peradaban*, 2(2), 80–88. <https://doi.org/10.55182/jnp.v2i2.173>.
- Veranti, R. I., & Ritonga, I. T. (2018). Analisis tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 6(3), 1–13. <https://doi.org/10.22146/abis.v6i3.59085>.
- Qomah, S., & Ismunawan. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(1), 95–108. <https://doi.org/10.25105/jat.v8i1.8718>.